

Perempuan dalam Pemilihan Kepala Daerah: Kemenangan Dewanti Rumpoko pada Pilkada Kota Batu Periode 2017 – 2022

Sherly Nur Nafisah

Universitas Indonesia, Jl. Margonda Raya, Kota Depok

Corresponding Author: sherlynn1207@gmail.com

Keyword:

Women in Local
Leaders Election;
Success Factor;
Kinship Politics.

Abstract: *The purpose of the research in this article is to clearly discuss and explore the factors that helped Dewanti to win the Pilkada in Batu City in period 2017-2022. Qualitative research methods are used by researchers to present data by describing and explaining the overall data in a more in-depth and comprehensive manner. Dewanti's victory was due to several supporting factors, among the three supporting factors was her political kinship with her husband, who had previously served as Mayor of Batu City. When viewed from the political concept of kinship, currently there are many husband-wife or father-child lines that occur in several regions. Just like Dewanti who managed to sit as Mayor with political kinship ties drawn from the husband and wife line. The figure of her husband has played an important role in the success of Dewanti in winning the 2017 Pilkada in Batu City. Kinship politics has indeed become the main and major capital for prospective candidates, especially female candidates in Pilkada contests and not a few negative comments have emerged about this phenomenon. Negative reviews will disappear when female candidates can prove their leadership performance is really fought only for their people.*

Kata Kunci:

Perempuan dalam
Pilkada;
Faktor Keberhasilan;
Politik Kekerabatan.

Abstrak: Tujuan penelitian dalam artikel ini jelas akan membahas dan mengupas faktor-faktor yang membantu Dewanti hingga dapat memenangkan Pilkada di Kota Batu di periode 2017-2022. Metode penelitian kualitatif digunakan oleh peneliti untuk menyajikan data dengan mendeskripsikan dan menjelaskan keseluruhan data secara lebih mendalam dan komprehensif. Kemenangan Dewanti tidak lain karena ada beberapa faktor pendukung, diantara dari ketiga faktor pendukung ialah ikatan politik kekerabatannya dengan sosok suaminya yang sebelumnya sudah terlebih dahulu menjabat sebagai Wali Kota Batu. Jika dilihat dari konsep politik kekerabatan, saat ini banyak garis suami-istri atau ayah-anak yang terjadi di beberapa daerah. Layaknya seperti Dewanti yang berhasil duduk sebagai Wali Kota dengan ikatan politik kekerabatan yang ditarik dari garis suami-istri. Sosok suaminya memiliki peranan cukup penting dalam factor keberhasilan Dewanti untuk bisa memenangkan Pilkada 2017 di Kota Batu. Politik kekerabatan memang menjadi modal utama dan besar bagi calon kandidat terutama calon perempuan dalam kontestasi Pilkada dan tidak sedikit ulasan negatif bermunculan akan fenomena tersebut. Ulasan negative akan hilang ketika para calon perempuan bisa membuktikan kinerja kemepimpinannya yang nyata diperjuangkan hanya untuk rakyatnya.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara yang menerapkan sistem demokrasi, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak akan lepas dari persoalan-persoalan yang berhubungan langsung dengan prinsip dasar serta nilai demokrasi yang harus diwujudkan. Salah satu instrumen penting dalam mewujudkan demokrasi sendiri ialah pemilihan umum (pemilu) yang tujuannya adalah menghadirkan sosok pejabat-pejabat publik yang diharapkan mampu membawa perubahan negara dan masyarakat yang lebih sejahtera. Lebih jelasnya untuk Negara Indonesia sendiri, pemilu merupakan salah satu sarana penting yang dapat memberikan mandat kepada orang tertentu yang akan mewakili warga negara dalam mengambil keputusan politik. Pemilu juga menjadi satu wadah penting untuk melihat realitas bagaimana partisipasi seluruh rakyat sebagai pemangku kekuasaan tertinggi di negara demokrasi bisa berjalan ataukah tidak. Partisipasi rakyat tidak hanya terpaut mengenai rakyat yang memilih, namun lebih luas lagi

partisipasi rakyat dimaksudkan untuk mendatangkan rakyat yang siap untuk menjadi sosok wakil dari rakyat lainnya.

Penyelenggara pemilu jika sesuai dengan inti dasar demokrasi maka harus dilaksanakan dengan *free* dan *fair*, didukung pula dengan semangat *civil liberties* (Marwah, 2016). Dilihat dari makna *civil liberties* sendiri maka negara demokrasi harus menjunjung tinggi hak kemerdekaan atau hak kebebasan bagi setiap warga negaranya, terutama dalam ruang lingkup politik. Di Indonesia, *civil liberties* lebih lanjut dijelaskan pada landasan konstitusional negara yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mulai dari pasal 27 hingga pasal 34 yang berisi hak-hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Tetapi dari semua pasal tersebut, satu pasal penting yang dianggap menjelaskan bagaimana warga negara mendapatkan kemerdekaan untuk berserikat dan berkumpul untuk bisa mengeluarkan pikirannya secara lisan maupun tulisan yang telah ditetapkan dengan undang-undang yang mana termaktub pada Pasal 28 (Mahkamah Konstitusi RI, 2015). Dengan melihat penjelasan tersebut maka warga negara tanpa memandang suku, agama, ras, antar golongan (SARA) maupun gender berhak mendapatkan hak-hak kemerdekaan tersebut. Di dalam lingkup politik pun, tiap warga negara tanpa membeda-bedakan SARA atau gender juga berhak untuk memilih dan juga untuk dipilih serta berpartisipasi secara langsung. Partisipasi warga negara antara laki-laki dengan perempuan diperlukan proporsi yang memang seimbang tanpa adanya ketimpangan di satu sisi.

Namun dilihat secara realitas politiknya di Indonesia, permasalahan yang muncul adalah ketidakseimbangan peran politik antara laki-laki dengan perempuan. Seolah-olah terdapat dinding besar yang menghadang perempuan untuk berperan secara aktif dalam politik yakni nilai patriarki yang masih mendarah daging di budaya negeri ini serta adanya hambatan berlapis (*multi-burden*) di ruang privat dan publik bagi perempuan. Keterlibatan yang belum sempurna bagi perwakilan perempuan dalam politik nampak jelas terlihat pada keterwakilan perempuan yang duduk di kursi legislatif maupun eksekutif. Namun seiring berjalannya waktu, kurangnya keterwakilan perempuan di pemerintahan akhirnya bisa sedikit terobati dengan gebrakan sebuah kebijakan yakni kebijakan afirmatif, mengingat apa yang dikatakan Pippa Norris bahwa di dalam meningkatkan representasi perempuan dalam politik diperlukan sejumlah desain kebijakan yang sesuai dengan konteks negara (Norris, 2003). Dimana kebijakan afirmatif memiliki tujuan yang mana agar para perempuan mempunyai posisi yang kuat untuk bisa sekedar mempegaruhi suara yang notabenehnya didominasi oleh kaum laki-laki (True, 2012). Selain itu, kebijakan afirmatif juga dianggap menjadi sebuah cara atau strategi khusus dalam kelembagaan yang dampaknya bisa bersifat efektif, karena dengan adanya kebijakan ini maka secara keseluruhan dapat mempromosikan kesetaraan gender untuk kelompok perempuan yang tidak terwakili di dalam politik. Di Indonesia, dilihat dari perjalanan sejarahnya, kebijakan ini mulai diterapkan semenjak hancurnya rezim Orba yang ditandai dengan dibuatnya regulasi mengenai keterwakilan perempuan dalam politik. Semakin lama regulasi tersebut semakin diperbarui dengan melihat realita saat ini, yang mana untuk saat ini kuota 30% merupakan pilihan yang dianggap menjadi pemecah permasalahan keterwakilan perempuan di negeri ini. Karena kebijakan afirmatif kuota diyakini mampu meningkatkan representasi perempuan hingga setara (Dahlerup, 2002). Pengaturan kebijakan kuota 30% lebih dalam lagi tertuang pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 mengenai Partai Politik, yang mana beberapa pasalnya menjelaskan mengenai kuota yang harus disediakan dan dipenuhi partai politik untuk menyertakan perempuan (Nawawi, 2009).

Diberlakukannya kebijakan afirmatif memang secara khusus diberlakukan untuk peningkatan keterwakilan perempuan di kursi legislatif, lalu yang menjadi tanda tanya besar, apakah di kursi eksekutif baik di tingkat nasional maupun daerah persoalan keterwakilan perempuan belum ada aturan khusus yang mengatur?. Jika berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang mengatur tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota memang nampak pemilihan yang ada berlaku secara netral gender, yang mana maksudnya tidak memprioritaskan atau mengunggulkan jenis kelamin tertentu. Perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dan setara untuk bisa berkompetitif dalam pusaran pilkada. Namun pada realitanya, sejak

dimulai pilkada pertama kali pada tahun 2005, keterwakilan perempuan yang mencalonkan terbilang masih rendah. Meskipun seiring berjalannya waktu, pada pilkada kemarin pun yang tergolong adanya peningkatan jumlah keterlibatan perempuan masih saja belum beranjak dari posisi yang rendah secara garis besar. Dibuktikan pada awal pelaksanaan pilkada yang terjadi sekitar tahun 2005-2006, dimana dari 296 daerah yang menyelenggarakan pilkada, 235 daerah tidak ada satu pun kandidat perempuannya (Women Research Institute). Kemudian pada pilkada di tahun-tahun berikutnya mulai nampak ada peningkatan sedikit demi sedikit, seperti pada pilkada serentak tahun 2016-2017 yang menunjukkan kurang lebih 7% proporsi calon perempuan telah ikut berkompetisi, baik untuk calon kepala daerah maupun calon wakil kepala daerah. Di tahun 2018, keterwakilan perempuan dalam pilkada naik sedikit dari 7% menjadi 8,85% atau sekitar 101 perempuan turut ikut-serta. Dan untuk pilkada yang masih hangat diselenggarakan kemarin ada peningkatan menjadi 10,6% atau sekitar 157 calon perempuan yang maju dalam pilkada 2020 (Medistiara, 2020).

Peningkatan yang mulai nampak signifikan dari keterlibatan perempuan dalam pilkada memang menjadi dasar yang perlu diperhatikan, namun faktor lain yang juga turut andil untuk diperhitungkan ialah kesempatan perempuan yang maju dalam pilkada untuk menang atau mendapatkan kepercayaan masyarakatnya untuk memimpin daerahnya. Nyatanya pada pilkada 2015 hanya 8,7% perempuan yang menang, lalu pilkada 2017 malah menunjukkan hasil yang kurang baik karena hanya 5,9% perempuan yang dapat memenangkan kompetisi tersebut. Untuk pilkada 2018 sendiri memang sudah nampak mulai merangkak naik kembali menjadi 9,06% perempuan yang bisa menang (Masita, 2020). Dari data tersebut jelas bahwa setelah persoalan keterlibatan perempuan, calon kandidat perempuan ternyata masih harus menerima tantangan kembali untuk menarik hati masyarakatnya agar bisa memilih mereka dibalik budaya patriarki yang masih saja mengental di tiap-tiap daerah. Tidak berhenti disitu saja, persoalan yang cukup krusial lainnya juga masih menghadang perempuan yang terlibat dalam pilkada yakni tingkat keberhasilan kepala daerah maupun wakil kepala daerah perempuan dalam memimpin di suatu daerah. Dilihat dari latar belakang perempuan-perempuan yang maju dalam pilkada mayoritas didominasi oleh politik kekerabatan. Karena banyak anggapan bahwa dengan politik kekerabatan, perempuan yang maju akan memiliki porsi kemenangan lebih tinggi atau lebih mudah dibanding calon lainnya. Namun imbas dari politik kekerabatan tersebut acapkali sangat ketara. Salah satunya ialah kualitas dan kuantitas perempuan yang terlibat dalam pilkada, terutama jika perempuan tersebut mampu memenangkan kompetisi dan akhirnya menjabat selaku kepala maupun wakil kepala daerah. Kualitas dan kuantitas yang belum mumpuni mau tidak mau berdampak kepada pembangunan daerah dari berbagai bidang. Hasil riset Tim Politik Gender Pusat Penelitian Politik (LIPI) pada tahun 2017 membuktikan bahwa kepala daerah perempuan yang berasal dari politik kekerabatan ternyata di satu sisi berdampak negatif yaitu lemahnya kinerja perempuan yang terpilih dalam mendorong demokratisasi local (dkk, 2017).

Perspektif negatif dari keterlibatan perempuan yang duduk sebagai kepala ataupun wakil kepala daerah yang memiliki keterkaitan dengan politik kekerabatan memang hingga detik ini tidak bisa dicampakkan begitu saja. Semakin deras publik memandang serta menilai bahwa keterwakilan perempuan sebagai kepala atau wakil kepala daerah masih jauh dari sosok pemimpin yang diidam-idamkan oleh masyarakat. Terlebih jika ada kaitannya dengan keluarga penguasa yang memiliki *track record* buruk sebelumnya seperti salah satunya terjaring kasus korupsi. Hal tersebut akan menambah buruk pandangan publik dan mendorong ketidakpercayaan publik kepada keterwakilan perempuan untuk duduk di kursi eksekutif daerah. Namun ternyata tidak secara keseluruhan pandangan tersebut berdampak kepada perempuan yang turut berpartisipasi dalam pilkada, seperti salah satunya yang akan diangkat oleh penulis sebagai subyek utama dalam makalah ini yaitu Dewanti Rumpoko selaku Wali Kota Batu Jawa Timur. Sebagai perempuan pertama kali yang berkompetisi di pilkada Kota Batu dan akhirnya menjabat sebagai Wali Kota Batu perempuan untuk pertama kali serta perempuan pertama kali yang terpilih sebagai kepala daerah di Malang Raya (Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu) ini ternyata memiliki beberapa faktor keberhasilan yang mendorong atau menyokong Dewanti dalam memenangkan pilkada 2017 silam. Perlu diketahui, jika ditelusuri

dari latar belakangnya, Dewanti merupakan istri dari Eddy Rumpoko selaku mantan Wali Kota Batu 2 periode sebelumnya yang juga tersandung masalah korupsi yang hingga detik ini masih berada dibalik jeruji besi. Dengan kejadian yang menimpa suaminya, pasti membuat Dewanti semakin tidak mudah untuk melaju dan bersaing di pilkada tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam memperoleh data-data yang diperlukan, penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode ini bersifat khusus yang membahas, mengupas, serta menggambarkan suatu fenomena yang lebih mendalam mengenai kajian atau fenomena Perempuan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Metode kualitatif sendiri terbagi dari beberapa unsur didalamnya, seperti fokus penelitian hingga jenis data yang digunakan. Untuk fokus penelitian terpusat kepada persoalan perempuan yang berhasil menduduki jabatan kepala daerah seperti yang diangkat pada penelitian kali ini yaitu Dewanti Rumpoko yang berhasil menjabat sebagai Wali Kota Batu periode 2017-2022. Mengenai tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan tujuan bisa menyajikan gambaran dan data secara lebih komprehensif dibantu dengan jenis data yang digunakan yakni data sekunder.

HASIL DAN DISKUSI

Faktor Keberhasilan Dewanti Rumpoko dalam Memenangkan Pilkada Kota Batu 2017

Pada pilkada yang diselenggarakan tahun 2017 silam, Kota Batu merupakan salah satu kota atau daerah yang turut menyelenggarakan pemilihan tersebut untuk memperoleh pemimpin daerah yang baru. Terdapat empat pasang calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu yang bertarung pada pilkada 2017 kemarin, dimana dari keempat pasang calon tersebut, terdapat satu calon Wali Kota yang menjadi pusat perhatian karena beliau merupakan satu-satunya kandidat perempuan yang berpartisipasi pada pilkada 2017 kemarin.

Tabel 1. Pasangan Calon Pilkada Kota Batu tahun 2017

No	Nama Pasangan Calon	Jalur	Pengusung
1	Rudi dan Sujono	Partai Politik	PAN, Hanura Nasdem
2	Dewanti Rumpoko dan Punjul Santoso	Partai Politik	PDI-P, Golkar, Gerindra, PKS
3	Hairuddin dan Hendra Angga S	Partai Politik	PKB, Demokrat
4	Abdul Majid dan Kasmuri	Independen	-

Sumber : *Pilkada2017.kpu.go.id*

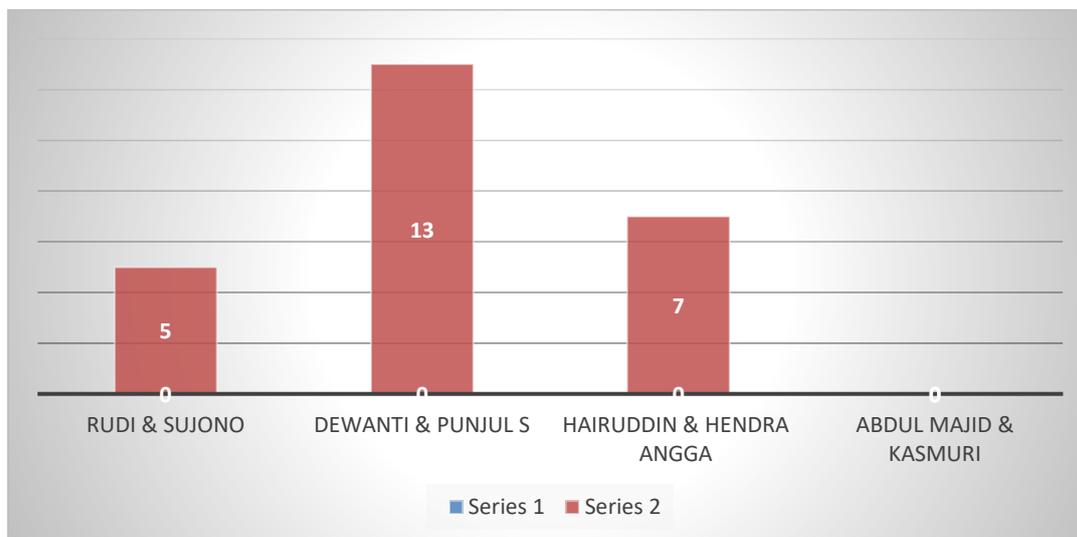
Dari keempat pasang calon yang bersaing, ada 3 pasang calon yang diusung oleh partai politik dan hanya satu pasang calon yang berangkat dari jalur independen atau perseorangan. Keempat pasang calon tersebut diantaranya yaitu Abdul Majid dengan Kasmuri Idris yang merupakan pasang calon independen, kemudian ada Hairuddin dan Hendra Angga yang berangkat dengan diusung 2 partai yakni PKB dan Demokrat, pasangan calon ketiga ada Rudi dan Sujono Djonet yang diusung dari 3 partai yakni PAN, Nasdem, serta Hanura, dan pasangan calon terakhir yang diusung oleh 4 partai diantaranya PDI-P, Golkar, Gerindra, dan PKS adalah Dewanti Rumpoko dengan Punjul Santoso (Hartik, 2016).

Dari keempat pasangan calon yang bersaing tersebut, terdapat satu pasangan calon yang namanya menjadi pusat perhatian masyarakat yaitu Dewanti-Punjul. Alasannya sendiri karena selain Dewanti merupakan satu-satunya calon perempuan yang berpartisipasi, beliau merupakan istri dari mantan Wali Kota sebelumnya yaitu Eddy Rumpoko. Perlu diketahui secara singkat, Eddy Rumpoko sendiri telah menjabat Wali Kota Batu selama 2 periode sebelumnya yaitu pada

periode 2007-2012 dan 2012-2017. Background dari keluarga Eddy Rumpoko sendiri akhirnya berpengaruh pula kepada istrinya yang saat itu mencalonkan sebagai Wali Kota Batu periode 2017-2022. Ayah mertua dari Dewanti merupakan sosok yang dikenal banyak orang karena kiprahnya di dunia militer serta di dunia politik, yang mana sebagai purnawirawan ayah mertua Dewanti yang bernama Brigjen TNI (Purn) Sugiyono atau lebih dikenal dengan nama Ebes Sugiyono merupakan salah satu pendiri Batalyon Infanteri (Yonif) 507/Sikatan, Kodam V/Brawijaya, serta pernah menjabat sebagai Kepala Staff Korem 084/Bhaskara Jaya. Seperti yang dikatakan oleh penulis sebelumnya, selain karir di militer, ayah mertua dari Dewanti tersebut juga sukses berkarir di bidang politik yang dibuktikan pernah menjadi Wakil Gubernur Irian Jaya periode 1983-1986 serta pernah menjadi Wali Kota Malang pada periode 1973-1983 (Wijoto, 2017). Dengan background keluarga suami seperti itu maka wajar jika kemudian Dewanti memutuskan untuk turun dalam ranah politik, terutama dengan status sebagai istri mantan Wali Kota menjadikan Dewanti saat itu lebih dikenal masyarakat Kota Batu dibandingkan pasangan calon lainnya. Selain itu nama Punjul Santoso pun juga tidak lagi asing ditelinga masyarakat setempat, karena pada periode sebelumnya Punjul pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Batu selama 2 periode dan pada periode 2012-2017 beliau pernah duduk sebagai Wakil Wali Kota Batu yang saat itu bergandengan dengan Eddy Rumpoko. Sehingga dari ulasan diatas maka tidak heran jika pasangan calon Dewanti-Punjul di satu sisi telah lebih dikenal di masyarakat setempat dibandingkan dengan pasangan lainnya. Otomatis hal tersebut menjadi sebuah keuntungan bagi pasangan ini untuk memudahkan keinginannya untuk menang dalam Pilkada 2017.

Sekilas ulasan diatas yang mengantarkan penjelasan lebih dalam mengenai sosok Dewanti Rumpoko dan ulasan diatas juga menjadi cikal-bakal keterkaitan Dewanti dalam kemenangannya di Pilkada Kota Batu tahun 2017 kemarin. Keberhasilan Dewanti dalam memenangkan pilkada 2017 silam semata-mata bukan hanya dibantu dari background keluarganya yang menggambarkan politik kekerabatan, tetapi lebih jauh ada beberapa faktor yang mendukung keberhasilannya. Penulis menganalisa dari data sekunder dan observasi yang dilakukannya, bahwa ada beberapa faktor penting lainnya yang berkaitan dengan keberhasilan Dewanti dalam pilkada Batu 2017.

Untuk faktor *pertama* yaitu dukungan partai politik utama dan koalisi yang solid. Partai politik pengusung utama Dewanti pada pilkada 2017 waktu itu ialah PDI-P, dimana Dewanti dan pasangannya yaitu Punjul merupakan kader aktif dari partai tersebut. Dewanti yang menjadi pengurus DPD PDI-P Jawa Timur mulai dari tahun 2014 membuat dirinya semakin dekat dan mudah memiliki relasi dengan elite partai tersebut hingga tingkat DPP. Selain kedekatan dengan elite partainya, simpatisan PDI-P atau pendukung PDI-P di Kota Batu terbilang banyak, dibuktikan dengan perolehan suara pada pemilihan umum seperti pada periode 2014. Dinyatakan secara resmi bahwa PDI-P pada pemilu 2014 mendapatkan perolehan kursi legislatif terbanyak yaitu 5 kursi di Kota Batu dan mendapatkan kursi Ketua DPRD Kota Batu kembali setelah pada pemilu 2009 PDI-P juga unggul dibandingkan dengan partai lainnya (Komisi Pemilihan Umum Kota Batu, 2019). Memang dari data sekunder yang didapatkan oleh penulis, suara PDI-P di Kota Batu yang termasuk wilayah Malang Raya selalu unggul di tiap periode pemilu dan selalu mengantarkan salah satu kadernya untuk duduk sebagai Ketua DPRD Kota Batu. Dominasi suara PDI-P di Kota Batu dan wilayah Malang Raya lainnya terjadi karena memiliki kelompok abangan yang cukup kuat (Nurjaman, 2014). Sehingga tidak heran jika pada pilkada 2017, Dewanti memiliki sokongan yang cukup kuat ditinjau dari partai pengusung utamanya yaitu PDI-P. Tetapi dukungan koalisi partai lainnya yang cukup solid juga tidak bisa dihiraukan begitu saja. Didukung oleh 3 partai lainnya yaitu Golkar, Gerindra, dan PKS membuat Dewanti semakin tak tergoyahkan dibanding pasangan calon lainnya. Terutama jika dihitung total kursi DPRD yang mendukung Dewanti berjumlah 13 kursi, yang mana hal ini sudah mengungguli jumlah kursi dari pasangan lainnya.

Grafik 1. Perolehan Kursi Legislatif di Kota Batu (2014-2019)

Sumber : *Pilkada2017.kpu.go.id*

Untuk faktor keberhasilan Dewanti yang *kedua* dalam memenangkan pilkada 2017 adalah ikatan politik kekerabatan yang cukup kuat. Sekilas yang telah penulis jelaskan diawal, Dewanti sendiri merupakan istri dari mantan Wali Kota Batu 2 periode sebelumnya yaitu Eddy Rumpoko. Dimana sosok Eddy Rumpoko memang dikenal sebagai pemimpin yang terbilang cukup berhasil merubah Kota Batu yang berwajah sebagai kota kecil menjadi kota wisata yang telah dikenal di seluruh negeri ini. Sebagai daerah otonom baru di tahun 2001, Eddy Rumpoko merupakan Wali Kota pertama yang terpilih melalui pilkada pada tahun 2007. Saat itu Eddy memang memfokuskan beberapa sektor yang dimiliki Kota Batu dengan baik, mulai dari sektor pertanian, peternakan, hingga pariwisata alamnya. Usaha yang dilakukan Eddy Rumpoko selama menjabat Wali Kota 2 periode tersebut ternyata berbuah manis dan membuat masyarakat Kota Batu semakin segan dengannya. Bagaimana tidak, laju perekonomian semakin mendulang tinggi karena dibantu dari banyak sektor, utamanya dalam sektor pariwisata yang membuat Batu dijuluki sebagai Kota Wisata dan De Klein Switzerland (Swiss Kecil di Pulau Jawa). Saat Eddy menjabat sebagai Wali Kota, otomatis Dewanti menjadi Ketua PKK Kota Batu yang ternyata telah banyak melakukan kegiatan positif bagi masyarakat Batu secara langsung. Sehingga wajar jika Dewanti semakin lama semakin dikenal di masyarakat saat menjadi Ketua PKK Kota Batu saat itu. Tetapi ternyata politik kekerabatan Dewanti tidak hanya berkutat dengan suaminya saja, ayah mertua Dewanti ternyata merupakan sosok yang telah lama dikenal oleh masyarakat Malang Raya karena karirnya yang cemerlang di bidang militer dan politik. Namun ada satu hal yang membuat politik kekerabatan dari Eddy Rumpoko tercoreng yaitu kasus korupsi yang menimpa Eddy Rumpoko sebelum masa jabatan Wali Kota yang kedua habis. Tepatnya pada bulan September 2017, kurang dari 3 bulan lagi masa jabatan sebagai Wali Kota habis, Eddy Rumpoko terkena OTT oleh KPK dengan dugaan menerima suap sebesar 295 juta dan satu unit mobil Toyota Alphard senilai 1,6 Miliar dari pengusaha Filiput Djap. Penangkapan tersebut membuat geger publik karena jika dilihat dari prestasi dan keberhasilan Eddy Rumpoko dalam memimpin Kota Batu, korupsi seolah-olah bukan menjadi godaan besar bagi Eddy, tetapi dalam realitanya korupsi telah mengotori prestasi dan keberhasilan Eddy selama ini. Namun menariknya, jangka waktu penangkapan Eddy Rumpoko dengan pilkada 2017 tidak terlampau jauh, hanya berkutat 3 bulan saja, tetapi sosok Dewanti sebagai istri Eddy Rumpoko ternyata tidak membuat masyarakat Kota Batu membenci dan tidak memilihnya. Nyatanya dari hasil pilkada 2017, Dewanti unggul dan memenangkan kompetisi tersebut dengan memperoleh suara sebesar 51.754 suara atau 44,23% (Komisi Pemilihan Umum Kota Batu, n.d.). Sehingga persoalan Eddy

Rumpoko sebagai tersangka kasus korupsi tidak membuat masyarakat Kota Batu enggan untuk memilih istrinya, namun karena kepercayaan masyarakat Kota Batu kepada Dewanti yang dianggap akan membawa perubahan untuk kota kecil yang hanya memiliki 3 kecamatan tersebut seperti apa yang telah dilakukan suaminya.

Selanjutnya untuk faktor *ketiga* dan terakhir ini juga patut diperhitungkan bagi kemenangan Dewanti. Rekam jejak beliau dalam dunia politik telah melalang-buana cukup lama dimulai sejak tahun 1990 yang saat itu pertama kali Dewanti terjun dan memilih Golkar sebagai partai pertamanya. Golkar saat itu juga pernah mengusung Dewanti untuk maju sebagai calon Wakil Wali Kota Malang pada tahun 2003, namun ternyata gagal. Akhirnya semenjak Eddy atau suaminya maju dalam pilkada Kota Batu 2007 yang diusung oleh PDI-P, membuat Dewanti berhenti berkarir di DPD Partai Golkar Kota Malang dan berpindah menjadi kader PDI-P. Saat itu beliau duduk di DPD PDI-Perjuangan Jawa Timur, dimana pada tahun 2015, lagi dan lagi beliau diusung untuk maju sebagai calon Bupati Malang. Namun naas, kegagalan untuk yang kedua kali menimpa Dewanti saat itu. Dari kegalan yang terjadi berturut-turut dikarenakan persiapan yang belum matang di waktu yang singkat akhirnya membuat hal tersebut sebagai pengalaman dan pembelajaran berharga bagi Dewanti. Beliau tidak patah semangat dan menunjukkan bahwa memang beliau layak sebagai sosok pemimpin dengan mengikuti ajang pilkada 2017 di Kota Batu. Akhirnya dari banyaknya pengalaman membuat Dewanti berhasil dalam pilkada tersebut (Cakra Wikara Indonesia).

Tabel 2. Perjalanan Politik Dewanti Rumpoko

Tahun	Perjalanan Politik Dewanti Rumpoko	Keterangan
1990	Masuk ke DPD Golkar Kota Malang sebagai Kader Partai	Pertama Kali Masuk Partai Politik
1997	Anggota DPRD Kota Malang	Maju dari Partai Golkar
2003	Calon Wakil Wali Kota Malang	Maju bersama Gandi Yogatama melalui Jalur Independen
2015	Calon Bupati Malang	Diusung oleh PDIO-P dan Sudah Berlabuh menjadi Kader PDI-P
2017	Wali Kota Batu	Diusung oleh 4 Partai Politik (PDI-P, Golkar, Gerindra, dan PKS)

Sumber: *Buku Dewanti Rumpoko berjudul "Tidak Ada Proses yang Instan"*

Tidak berhenti di pengalaman dan karir berpolitiknya, Dewanti juga memiliki faktor keberhasilan lain dari pengalaman dan karir sosialnya yang terbilang sangat aktif. Buktinya beliau pernah dipercayai dan diamanahi sebagai pemimpin di berbagai organisasi sosial seperti Ketua Yayasan Jantung Indonesia Cabang Malang Raya, Ketua Persatuan Renang Indonesia (PRSI) Cabang Malang, Ketua Forum PAUD Kota Batu, Ketua PMI Kota Batu, Komite Lions Club Indonesia, dan menjadi Wakil Ketua III Pengurus Harian KONI Jawa Timur. Dari banyaknya pengalaman di bidang politik dan sosial maka wajar kemudian jika sosok Dewanti terpilih sebagai pemimpin perempuan untuk pertama kali di Kota Batu dan pertama kali di wilayah Malang Raya.

Dari analisis diatas jika disandingkan dengan konsep politik kekerabatan maka sosok Dewanti Rumpoko menggambarkan bagaimana praktik dari fenomena politik kekerabatan di negeri ini semakin menyebar luas di seluruh daerah di Indonesia. Dan juga membuktikan bahwa praktik politik kekerabatan yang menggunakan garis suami-istri banyak dilakukan oleh para penguasa local demi mempertahankan kekuasaan yang telah diraih sebelumnya. Disatu sisi juga menunjukkan bahwa di mata masyarakat calon yang memiliki latar belakang politik kekerabatan, terutama dengan garis suami-istri tidak menjadi persoalan penting ketika mereka memilih calon tersebut. Bahkan sosok suami dari Dewanti Rumpoko memiliki peranan cukup penting ketika masyarakat Kota Batu memilih Dewanti pada Pilkada 2017 silam. Mengapa, karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, suaminya yaitu Eddy Rumpoko dianggap sebagai pemimpin yang berhasil memajukan Kota Batu dari yang belum menjadi apa-apa hingga menjadi kota kecil di Jawa Timur yang terkenal akan sumber daya alam dan wisatanya, yang dibuktikan dengan

lahirnya tagline Kota Wisata Batu yang tercetus dari ide serta pemikiran sosok Eddy Rumpoko. Keberhasilan suaminya membuat Dewanti dianggap mampu untuk meneruskan perjalanan untuk membangun dan mensejahterahkan warga Kota Batu. Meski diakhir perjalanan Eddy Rumpoko, dirinya harus terjatuh akan kasus korupsi dan secara tidak langsung hal tersebut akan mencoreng nama besar dari dirinya serta sosok Dewanti sebagai istrinya.

Namun kekhawatiran tersebut ternyata tidak terbukti, sama halnya dengan kekhawatiran dari beberapa akademisi mengenai dampak atau efek dari praktik politik kekerabatan yang salah satunya menyebutkan bahwa para penguasa akan menghindari tuntutan akuntabilitas yang mengakibatkan perilaku menyimpang yakni korupsi. Namun kekhawatiran tersebut terbantahkan jika melihat analisis Dewanti Rumpoko yang berhasil menduduki kursi Wali Kota di Kota Batu. Hingga sampai akhir masa jabatannya, Dewanti Rumpoko berhasil membuktikan pula bahwa dirinya telah tuntas secara bersih melaksanakan tanggung jawabnya sebagai sosok kepala daerah tanpa dikotori dengan kasus korupsi. Bayang-bayang suaminya yang dimasa akhir jabatan harus tertangkap KPK ternyata tidak membuat Dewanti terjerumus di lubang yang sama. Sehingga semakin menguatkan bahwa kekhawatiran dari dampak politik kekerabatan yang disampaikan oleh beberapa akademisi ternyata tidak dapat dibenarkan sepenuhnya.

Selain melihat dari sisi kekhawatiran akan dampak dari praktik politik kekerabatan yang ternyata tidak terbukti pada sosok Dewanti, peneliti juga melihat bahwa apa yang telah disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indo Barometer yakni Muhammad Qodari bahwa politik kekerabatan memiliki dampak positif pula. Dimana dampak positif tersebut jelas nampak dari diri Dewanti, bagaimana tidak, sosok Dewanti telah melang-buana dalam bidang politik kurang lebih 26 tahun. Pendidikan politik yang didapatkan dari keluarganya, terutama dari suami dan mertuanya menjadikan bekal tersendiri bagi sosok Dewanti untuk bisa terjun ke dunia politik dan berkontestasi dalam Pilkada selama 3 kali. Sehingga membuktikan bahwa politik kekerabatan juga memiliki dampak positif yakni memberikan Pendidikan politik yang lebih lama dibanding calon lainnya yang bukan berasal dari ikatan politik kekerabatan. Dengan Pendidikan politik lebih lama maka menghasilkan modal politik yang dimiliki dari sosok Dewanti juga lebih kuat.

Politik Kekerabatan

Fenomena politik kekerabatan bukan lagi menjadi sebuah fenomena asing di mata dunia. Politik kekerabatan sudah menjadi sosortan utama bagi berbagai negara yang di dunia, seperti yang terjadi di negara yang dikenal sebagai kiblat demokrasi yakni Amerika Serikat, lalu ada India, Pakistan Kanada, Filipina, dan lain sebagainya. Fenomena politik ini seringkali terjadi ketika perhelatan pesta demokrasi diselenggarakan. Seperti halnya yang terjadi pula di negagara Indonesia, yang mana praktik politik ini menjadi suatu pembicaraan hangat dan selalu erat dengan dunia perpolitikan di Indonesia. Di mata masyarakat Indonesia, fenomena politik kekerabatan secara umum dipahami sebagai peristiwa dimana adanya kemunculan hingga terjadi kemenangan dari calon legislative atau calon eksekutif daerah yang terikat dan memiliki kekerabatan dengan seseorang ataupun beberapa orang yang berada dalam pusran kekuasaan baik di tingkat institusi politik maupun institusi pemerintahan. Menurut Harjanto didalam bukunya mengatakan bahwa praktik politik kekerabatan dianggap sebagai dampak dari lemahnya pelembagaan kepartaian yang ada di negeri ini dan juga pelaksanaan didalam fungsi partai politik sendiri tidak berjalan dengan semestinya. Sehingga politik kekerabatan menjadi salah satu strategi atau jalan pintas bagi partai politik untuk dapat memenangkan sebuah kompetisi atau kontes politik (Harjanto, Politik Kekerabatan dan Institusionalisasi Partai Politik di Indonesia, 2011).

Secara harfiah, politik kekerabatan sering mengacu pada konsep-konsep keluarga politik (political family) atau politik kekerabatan (political dynasty). Namun pada intinya, politik kekerabatan akan lebih memfokuskan kepada aktifitas politik yang merekrut beberapa anggota di dalam keluarganya untuk diposisikan dalam jabatan-jabatan politik. (Harjanto, Politik Kekerabatan dan Institusionalisasi Partai Politik di Indonesia, 2011). Sehingga bisa digambarkan bahwa rekrutmen politik yang terjadi di dalam politik kekerabatan selalu melibatkan anggota

kerabat atau keluarganya demi menunjukkan eksistensi kekuasaan yang sebelumnya telah dimiliki oleh penguasa. Dengan seperti itu maka kekuasaan yang dimiliki akan diwariskan secara turun-temurun dalam pusaran keluarganya (Rusnaedy & Purwaningsih, 2018; Rusnaedy et al., 2021). Selain Harjanto, Leo Agustino didalam jurnalnya juga mendefinisikan mengenai politik kekerabatan, yang mana menurutnya politik kekerabatan ialah upaya penguasa dalam meletakkan keluarga serta kerabatnya pada posisi jabatan strategis dengan dalih untuk membangun kerajaan politik di dalam pemerintahan baik secara tingkat local hingga nasional. Upaya tersebut dilakukan semata-mata untuk menjaga dan lebih kekal dalam memegang kekuasaan (Agustino, 2010). Meletakkan keluarga atau kerabat dalam posisi jabatan strategis dianggap akan memudahkan penguasa untuk bisa mengontrol serta mengendalikan semuanya sesuai apa yang diinginkan oleh penguasa tersebut.

Praktik-praktik politik kekerabatan bisa terjadi dan semakin membludak di beberapa tahun terakhir di negeri ini dikarenakan beberapa hal yang menjadi factor potensial, seperti apa yang dikatakan oleh Romli, bahwa politik kekerabatan semakin banyak karena belum maksimalnya proses pelembagaan, kaderisasi, serta rekrutmen politik didalam tubuh partai-partai politik di Indonesia (Romli, 2008). Saat ini banyak partai politik yang mengedepankan pragmatisme atau lebih memilih untuk bagaimana cara mudah yang dilakukan agar bisa memenangkan kontestasi dalam pesta demokrasi. Cara-cara mudah tersebut diantaranya adalah mengusung atau mengangkat orang-orang dengan kepemilikan modal yang kuat, baik secara modal social, ekonomi, maupun modal politik, dibandingkan dengan harus mengusung kadernya yang lebih lama dan memahami ideologi perjuangan partainya sendiri. Selain itu, factor potensial lainnya yang menyebabkan politik kekerabatan semakin marak ialah adanya prevalensi politik kekerabatan yang prinsip kekuasaan politiknya cenderung mengarah kepada *self-perpetuation* (kecenderungan untuk ingin tetap eksis). Factor potensial ini disebutkan oleh Ernesto Dal Bo, Pedro Dal Bo, dan Jason Snyder di dalam jurnalnya yang berjudul *Political Dynasties* (Ernesto Dal Bo, 2009). Kecenderungan untuk *self-perpetuation* ini lebih mengarah kepada mengabadikan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa, sehingga bagaimana caranya penguasa akan terus eksis dengan kekuasaannya yang diturunkan melalui kerabat atau keluarganya. Faktor potensial terakhir yang menyebabkan politik kekerabatan berkembang cepat adalah ketiadaan peraturan atau regulasi yang melarang politik kekerabatan untuk turut-serta di dalam lingkup perpolitikan suatu negara (Rahmatunnisa, Menyoal Politik Kekerabatan di Indonesia dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, 2021).

Kemunculan politik kekerabatan akhirnya menuai pro dan kontra di lingkungan para akademisi hingga seluruh lapisan masyarakat yang merasakan dampaknya secara langsung. Para ahli akademisi sebelumnya pun telah mengkalkulasi dari sudut pandang teoritik dan empiriknya apa saja yang dikhawatirkan dengan praktik politik kekerabatan jika semakin lama semakin eksis di tengah situasi perpolitikan yang ada di seluruh negara, terutama negara-negara yang menganut system demokrasi. Kekhawatiran pertama diutarakan oleh Geys dan Smith, yang mana keduanya menyatakan bahwa politik kekerabatan secara tidk langsung menimbulkan turunnya kualitas keterwakilan. Hal tersebut bisa timbul dikarenakan adanay mekanisme akuntabilitas yang berubah menjadi lemah dan yang utama karena terhalangnya para kandidat lain untuk bisa bersaing di dalam suatu kontestasi. Padahal bisa saja para kandidat lain tersebut memiliki kualitas serta kuantitas lebih baik disbanding dengan kandidat dari kerabat atau keluarga penguasa (Smith, 2017 Vol 127 No 605). Selain itu, kekhawatiran lainnya juga turut dipikirkan oleh para ahli teori elit klasik seperti Roberto Michels, Mosca, hingga Pareto. Dimana mereka menganggap bahwa penguasa yang terikat dengan politik kekerabatan dapat menghindarkan dirinya dengan tuntutan akuntabilitas, sehingga lahirlah perilaku yang menyimpang seperti kasus yang rawan terjadi yaitu korupsi. Akuntabilitas bagi seorang penguasa memiliki peranan cukup penting untuk pelayanan bagi masyarakatnya, baik mengenai pertumbuhan perekonomian, kesejahteraan, hingga pembangunannya sendiri (Rahmatunnisa, Menyoal Politik Kekerabatan di Indonesia dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 , 2021). Kekhawatiran dari politik kekerabatan yang selanjutnya ialah integritas dari demokrasi itu sendiri. Banyak hal didalam demokrasi seperti partai politik menjadi salah satu korban dari hadirnya politik

kekerabatan. Partai politik secara tidak langsung akan dilemahkan peran dan fungsinya. Partai politik akan berubah hanya dianggap sebagai alat maupun kendaraan bagi penguasa untuk terus melanggengkan kekuasaannya. Selain dari sudut pandang partai politik, tatanan demokrasi tingkat local juga menerima dampak dari kehadiran politik kekerabatan. Seperti yang terjadi di Indonesia, yang mana di negeri ini politik kekerabatan mulai terkonfirmasi setelah runtuhnya rezim Orde Baru, yang ditandai dengan lahirnya system desentralisasi (Kenawas, 2017). Alih-alih dihadirkan untuk memberi kesempatan lebih luas kepada pemerintah daerah untuk bisa mengakses sumberdaya yang dimilikinya dan pendistribusian kekuasaan yang tidak terpusat ternyata dalam realitanya desentralisasi ini memperkuat kekuasaan dimiliki oleh segelintir orang-orang kuat local (local strongmen). Dari situlah kemudian monopoli kekuasaan di tingkat local semakin marak dan berkembang cukup pesat di berbagai daerah di Indonesia.

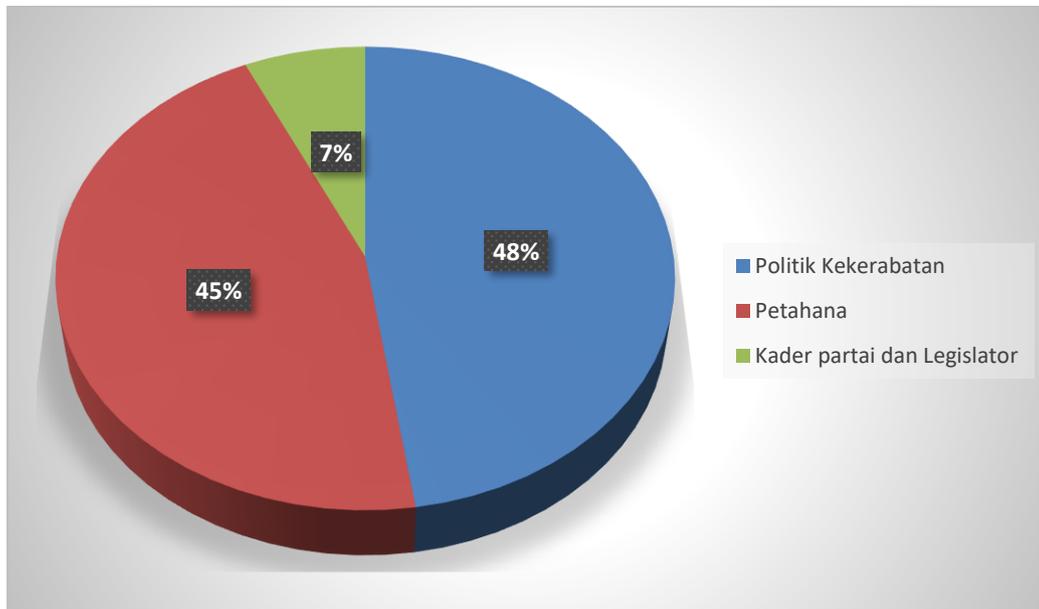
Namun fenomena politik kekerabatan di Indonesia secara garis besar dianggap tidak hanya menimbulkan kekhawatiran akan dampak-dampak negatifnya. Nyatanya, menurut salah satu pengamat politik di negeri ini yaitu Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari. Menurutnya, politik kekerabatan juga memiliki sisi positif yang patut untuk diperhitungkan. Salah satunya yang nampak pada kontestasi Pilkada di Indonesia, dimana figure-figur yang mencalonkan diri sebagai kepala atau wakil kepala daerah sudah lebih dikenal oleh masyarakat dibanding dengan calon lain yang tidak mempunyai ikatan politik kekerabatan. Tidak hanya itu, menurut Qodari, mereka calon-calon yang diusung dari politik kekerabatan juga telah mengantongi Pendidikan politik lebih lama karena sudah diperkenalkan mulai dari keluarganya sendiri. Sehingga dari dua hal tersebut maka calon yang diusung sudah mempunyai modal politik yang cukup kuat dibanding calon lainnya (Republika, 2013).

Melihat dari beberapa kekhawatiran dan sisi positif dari politik kekerabatan yang telah peneliti tuangkan diatas maka dapat diambil garis besarnya bahwa memang benar praktik politik kekerabatan yang saat ini semakin liar dan brutal terutama dalam kontestasi Pilkada di Indonesia menunjukkan bahwa keluarga memiliki pengaruh atau peranan penting dalam pembentukan politik seseorang. Menurut Mas'ood dan MacAndrews, keluarga dianggap mempunyai pengaruh besar dan kekal di dalam struktur sosialisasi politik dan mendorong anggota keluarga lainnya untuk lebih berpartisipasi di dalam politik (MacAndrews, 2011). Sehingga secara tidak langsung dari praktik politik kekerabatan ternyata membuktikan bahwa keluarga merupakan institusi pembentukan Pendidikan politik serta karakter dan sikap politik dari seseorang (Haboddin, 2017). Yang saat ini sedang marak terjadi dalam praktik politik kekerabatan ialah hubungan kandidat yang dicalonkan yang mana mayoritas diisi oleh istri-suami atau anak-ayah. Seperti kasus-kasus Pilkada di Kabupaten Sragen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Probolinggol, dan Kota Cimahi, dimana istri dari incumbent diusung dalam kontestasi Pilkada. Dari gambaran tersebut maka terlihat bahwa nama besar dari seorang suami seolah-olah dijual demi memperebutkan jabatan sebagai kepala atau wakil kepala daerah. Posisi kedua setelah istri, politik kekerabatan seringkali menggunakan hubungan anak-ayah. Dan tidak sedikit yang berhasil menggantikan posisi ayahnya sebagai kepala atau wakil kepala daerah di negeri ini. Layaknya kasus di Kabupaten Kutai Kertangera, Provinsi Jambi, dan kasus dari keluarga Yasin Limpo (Haboddin, Politik Primordialisme dalam Pemilu di Indonesia , 2015).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Perkumpulan untuk pemilu dan Demokrasi (Perludem) pada Pilkada 2018, terdapat 101 calon kepala dan wakil kepala daerah yang berjenis kelamin perempuan. Dari jumlah tersebut yang akhirnya terpilih dan memenangkan kontestasi Pilkada pada tahun tersebut sebanyak 31 perempuan atau sekitar 9,06% keterpilihan calon perempuan dalam Pilkada 2018. Dari jumlah keterpilihan perempuan tersebut terbagi menjadi 2, ada 14 perempuan yang terpilih untuk duduk sebagai kepala daerah dan sisanya sebesar 17 perempuan terpilih untuk menjabat sebagai wakil kepala daerah. Kemenangan 31 perempuan tersebut juga terdiri dari tingkatan wilayah yang berbeda, terdapat 3 perempuan yang terpilih di tingkat provinsi, 9 kota, dan 19 kabupaten (Perludem , 2018). Latar belakang atau background dari masing-masing perempuan yang terpilih pun juga bermacam-macam, mulai dari mereka yang memiliki ikatan politik kekerabatan, petahana atau juga mantan legislator, hingga kader

partai. Dari berbagai macam background tersebut, mayoritas perempuan yang terpilih adalah dengan background ikatan politik kekerabatan yang dimiliki, baik dengan petahana, penguasa/elit, atau elit partai politik. Lalu disusul dengan mantan legislator, petahana, serta kader-kader partai. Jika dilihat secara garis besar dari 31 perempuan terpilih, sebanyak 47,62% perempuan terpilih memiliki latar belakang dengan kepemilikan jaringan politik kekerabatan (Salabi, 2018).

Grafik 2. Background Keterpilihan Perempuan pada Pilkada 2018



Dari data tersebut dapat digarisbawahi bahwa pertama, praktik politik kekerabatan di ranah Pilkada di negeri ini sudah menjai hal yang wajar dan lumrah. Lalu kedua, bahwa keterwakilan serta keterpilihan perempuan dalam Pilkada didominasi dengan mereka yang mempunyai jaringan politik kekerabatan dengan pemimpin sebelumnya atau dengan para elite-elite partai politik.

KESIMPULAN

Partisipasi politik perempuan dalam pilkada semakin menunjukkan antusias yang cukup tinggi, terutama bagi perempuan yang memiliki ikatan politik kekerabatan dalam suatu daerah, layaknya Dewanti. Dewanti Rumpoko yang awalnya menjadi satu-satunya perempuan yang bersaing dalam pilkada Kota Batu 2017 ternyata membuktikan bahwa segala faktor hambatan atau kendala bagi perempuan untuk masuk dalam politik tidak sepenuhnya benar dalam realitanya saat ini. Dewanti menggambarkan bahwa pemimpin perempuan juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki, tidak ada hambatan dan keterbatasan yang menghadang. Keberhasilan Dewanti di dalam pilkada 2017 di Kota Batu memang tidak bisa terjadi tanpa adanya faktor-faktor pendukung, mulai dari partai politik pendukung, ikatan politik kekerabatan, hingga kemampuan serta pengalaman di lingkup politik dan sosial. Bayang-bayang buruk politik kekerabatan dari Dewanti karena ulah suaminya yang tersandung kasus korupsi ternyata tidak membuat masyarakat Batu enggan memilihnya. Masyarakat Kota Batu menganggap dengan hadirnya Dewanti sebagai Wali Kota akan melanjutkan pembangunan yang sebelumnya telah dilakukan oleh suaminya. Jejak keberhasilan suaminya juga menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat Kota Batu dibanding melihat kasus korupsi yang menodai rekam jejak suaminya. Sehingga dengan mengaca persoalan Dewanti membuktikan bahwa faktor keberhasilan Dewanti tidak lepas dari ikatan politik kekerabatan yang cukup kuat di keluarganya, terutama dari sosok suaminya. Dengan demikian nampak bagaimana ikatan politik kekerabatan yang ditrik dari garus suami-istri masih memiliki porsi tersendiri bagi masyarakat Kota Batu. Anggapan

bahwa sosok istri dapat meneruskan perjalanan pembangunan yang sebelumnya telah dilakukan oleh suaminya ternyata masih kental di tengah masyarakat Kota Batu. Bahkan, kasus korupsi yang melanda Eddy Rumpoko tidak menjadi bahan masyarakat untuk tidak memilih Dewanti. Nyatanya, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Wali Kota Batu, Dewanti membuktikan bahwa dirinya bersih dari kasus korupsi. Dan juga menunjukkan bahwa dengan ikatan politik kekerabatan yang dimilikinya menghasilkan modal politik lebih kuat karena telah dibekali akan Pendidikan politik lebih lama didalam keluarganya terutama dari suaminya.

REFERENSI

- Anonim. (2015). "Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia dengan UUD 1945". Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Diakses dari <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11732#:~:text=Pasal%2028J%20ayat%202%20menyatakan,sesuai%20dengan%20pertimbangan%20moral%2C%20nilai%2D>.
- Anonim. "Wajah Muram Keterwakilan Perempuan dalam Pilkada di Indonesia". Artikel Lembar Fakta Women Research Institute
- Budiarjo, Miriam. (1998). "Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai". Jakarta: Gramedia.
- Dahlerup, Drude. (2002). "Quotas-A Jump to Equality? The Need for International Comparisons of the Use of Electoral Quotas to Obtain Equal Political Citizenship for Women". Paper dalam Workshop International IDEA.
- Dewi, dkk. (2017). "Perempuan Kepala Daerah dalam Jejaring Oligarki Lokal". Jakarta: LIPI Press.
- Hartik, Andi. (2016). "Empat Pasang Calon akan Bersaing di Pilkada Kota Batu 2017". RegionalKompas.com. Diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2016/10/24/20434611/empat.pasang.calon.akan.bersaing.di.pilkada.kota.batu.2017>.
- Margaret, Lycette. (1994). "Adjusting Project to Overcome Constraint". Women Participation Forum USAID.
- Marwah, Sofa. (2016). "Representasi Perempuan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak di Jawa Tengah Tahun 2015". Jurnal Politik Vol. 01, No. 02.
- Masita, Bau. (2020). "Perempuan dan Pilkada". MediaIndonesia.com. Diakses dari <https://mediaindonesia.com/opini/332409/perempuan-dan-pilkada>.
- McClosky, Herbert. (1972). "Political Participation: International Encyclopedia of The Social Sciences". New York: MacMillan Company and The Free Press.
- Medistiara, Yulida. (2020). "Partisipasi Calon Kepala Daerah Perempuan di Pilkada 2020 Naik 10,6%". NewsDetik.com. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5190123/partisipasi-calon-kepala-daerah-perempuan-di-pilkada-2020-naik-106>.
- Mukarom, Zaenal. (2008). "Perempuan dan Politik: Studi Komunikasi Politik tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif". Jurnal Mediator Vol. 09, No. 02.
- Nimmo, Dan. (2000). "Political Communication and Public Opinion". California: Goodyear Publishing Company.
- Norris, Pippa. (2003). "Increasing Women's Representation in Government: What Options would Work Best for Afghanistan?". Paper dalam The Afghanistan Reconstruction Project, Center on International Cooperation, New York University.
- Nurjaman, Asep. (2014). "Party Survival: Strategi Meraih Kursi di Era Reformasi". Jurnal Humanity Vol. 9, No. 02.
- Perludem. (2018). "Potret Perempuan Kepala Daerah Terpilih di Pilkada 2018". Perludem.org. Diakses dari <https://perludem.org/2018/08/01/potret-perempuan-kepala-daerah-terpilih-di-pilkada-2018/>.
- R, Baswir. (2009). "Kepemimpinan Nasional, Demokratisasi, dan Tantangan Globalisasi". Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Roth & Wilson. (1980). "The Comparative Study of Politic". New York: Prencite Hall Inc.

- Rusnaedy, Z., Fatma, F., & Haris, A. (2021). Political Dynasty and Single Candidate in Indonesian Local Elections: Where Are The Parties?. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 3(2), 124-136.
- Rusnaedy, Z., & Purwaningsih, T. (2018). Keluarga Politik Yasin Limpo Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gowa Tahun 2015. *Jurnal Politik*, 3(2), 5.
- Surbakti, Ramlan. (1999). "Memahami Ilmu Politik". Jakarta: Gramedia.
- Temuan Riset oleh Cakra Wikara Indonesia tentang "Perempuan sebagai Kepala Daerah: Pola Kepemimpinan dan Kebijakan". Diakses dari https://cakrawikara.id/wp-content/uploads/2020/08/PPT-Webinar-Kada-Perempuan-CWI_250820_ed.pdf.
- True, Parashar, & George N. (2012). "Women's Political Participation in Asia and The Pacific". *Journal of Artsonline Monash University*.
- Website KPU Kota Batu. Diakses dari <https://kpu-kotabatu.go.id/anggota-dprd-kota-batu-periode-tahun-2014-sd-2019/>.
- Wijoto, Ribut. (2017). "Inilah Biografi Eddy Rumpoko". *BeritaJatim.com*. Diakses dari http://m.beritajatim.com/hukum_kriminal/308483/inilah_biografi_eddy_rumpoko.html.